



## DETERMINASI FAKTOR UTAMA DALAM KETIDAKMERATAAN PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN JEMBER

Ratih Novi Listyawati<sup>1)</sup>, Prasetyo<sup>2)</sup>, Nunung Nuring Hayati<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Teknik, Universitas Jember

email: ratihnovilistyawati@unej.ac.id

<sup>2</sup> Program Studi Teknologi Sipil, Politeknik Negeri Malang Kampus Lumajang

email: prasetyo.psdku@polinema.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Teknik, Universitas Jember

email: nunung.nuring@unej.ac.id

### Abstrak

Kabupaten Jember secara administratif memiliki 226 desa yang tersebar pada 31 Kecamatan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2016 Kabupaten Jember memiliki satu desa dengan kategori sangat tertinggal serta desa lainnya tersebar dalam kategori tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Jumlah desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami pengurangan yang mengindikasikan pembangunan desa yang intensif, namun disisi lain juga mengindikasikan adanya perkembangan desa yang tidak merata. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menitik beratkan pembangunan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi sebuah modal dalam perwujudan desa maju dan mandiri. Latar belakang inilah yang menjadi dasar dalam perumusan indikator dalam Indeks Desa Membangun dengan tujuan untuk menjadi kekuatan desa dalam menjaga kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi bagi kesejahteraan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menentukan faktor utama yang mestinya dapat menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah. Tujuan penelitian tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Berdasarkan hasil analisis dari pengambilan data kepada pakar, diperoleh bahwa faktor utama ketidakmerataan perkembangan desa adalah pada dimensi Pendidikan dengan nilai AHP 0,268 disusul dengan dimensi ekonomi dengan nilai 0,229. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar terwujud perkembangan desa yang merata, pemerintah perlu memfokuskan pembangunan pada aspek Pendidikan dan aspek ekonomi. Pada aspek Pendidikan, pemerintah dapat memperluas akses masyarakat terhadap sarana Pendidikan serta kualitas dari sarana Pendidikan. Selain itu pada aspek ekonomi, pemerintah dapat memperluas keterjangkauan terhadap pusat pelayanan perdagangan serta keterjangkauan ke lembaga keuangan dan perkreditan.

**Kata Kunci:** Analytical Hierarchy Process, Indeks Desa Membangun, Perkembangan Desa.

### Abstract

Administratively, Jember Regency has 226 villages spread over 31 sub-districts. Based on data from the 2016 Development Village Index, Jember Regency has one village in the very underdeveloped category. The other villages are underdeveloped, developing, advanced, and independent. The number of villages in the underdeveloped and very underdeveloped categories from 2018 to 2022 has decreased, which indicates intensive village development. However, on the other hand, it also indicates uneven village development. Realizing an advanced and independent

village requires the principle of sustainable development, which emphasizes social, economic, and ecological aspects. The three aspects, as mentioned before, become the basic concept in formulating indicators in the Developing Village Index to become village strength in maintaining village potential and capabilities for the welfare of village life (Directorate General Village and Rural Development, 2020). Based on these problems, the research objective was formulated, namely to determine the main factors that should be the focus of development by the government. The research objectives can be achieved by using the Analytical Hierarchy Process method. Based on the results of the analysis of collecting data from experts, it was found that the main factor for inequality in village development was the education dimension, with an AHP value of 0.268, followed by an economic dimension with a value of 0.229. In order to achieve equitable village development, the government needs to focus development on the educational and economic aspects. In the education aspect, the government can expand public access to educational facilities and the quality of educational facilities. In addition to the economic aspect, the government can expand access to trade service centers as well as access to financial and credit institutions.

**Keywords:** Analytical Hierarchy Process, Developing Village Index, Village Development,

## 1. PENDAHULUAN

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu wilayah dengan kepemilikan sejumlah penduduk yang terikat sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki posisi terendah dibawah kepemimpinan seorang camat serta memiliki hak dalam mengatur wilayahnya sendiri. Desa merupakan basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan (Prabowo, 2013). Sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan jika permasalahan sosial dan ekonomi di pedesaan dapat teratasi dengan meningkatkan pembangunan manusia, memperbaiki sistem ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Indonesia menjadi lebih maju, dapat dimulai dari desa (Iskandar, 2020). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2019) wilayah pedesaan mencapai 91% dari keseluruhan wilayah Indonesia dan sejumlah 43,3% masyarakat di wilayah Indonesia bertempat tinggal di desa. Sehingga pembangunan yang terfokus pada wilayah desa menjadi hal yang prioritas dan *urgent* untuk ditangani. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam memfokuskan pembangunan di desa adalah melalui tersusunnya SDGs Desa. SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah sebuah usaha komprehensif dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan di desa, memeratakan pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan

kesehatan masyarakat desa, meningkatkan kepedulian desa terhadap lingkungan, meningkatkan kepedulian desa terhadap Pendidikan, meningkatkan jejaring desa serta menumbuhkan desa berbudaya sebagai wujud percepatan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Hasraruddin, 2021).

Pengukuran terhadap tingkat perkembangan desa di Indonesia telah dilakukan sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun pengukuran perkembangan desa melalui Indeks Pembangunan Desa, dimana pada tahun 2014 jumlah desa tertinggal mencapai 20.167 (27,22%) dari total 74.093 desa di Indonesia berdasarkan dimensi pelayanan dasar masyarakat, ketersediaan infrastruktur, keterjangkauan dalam hal transportasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu masih rendahnya kualitas Pendidikan masyarakat desa, dimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 58% penduduk usia produktif yang hanya lulusan SD dari total 58,4 Juta (BPS, 2014). Pengukuran terhadap perkembangan desa saat ini berkembang menjadi Indeks Desa Membangun yang disusun oleh Kementerian Desa.

Indeks Desa Membangun menggambarkan sebuah perkembangan desa dengan mengacu kepada implementasi Undang-Undang tentang desa serta peran pendamping dan penggunaan dana desa. IDM

memberikan arahan ketepatan implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan partisipasi masyarakat dan karakteristik desa yang meliputi tipologi dan modal sosial (Kementerian Desa, 2020)

Secara astronomis, Kabupaten Jember terletak pada 113°30'–113°45' Bujur Timur dan 8°00' sampai 8°30' Lintang Selatan dengan luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Kabupaten yang secara administratif masuk pada provinsi Jawa Timur ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang di sisi barat, Kabupaten Banyuwangi di sisi timur dan Kabupaten Bondowoso di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Jember memiliki 226 desa yang tersebar pada 31 kecamatan. Merujuk pada data Indeks Desa Membangun oleh Kementerian Desa, pada tahun 2022, desa-desa di Kabupaten Jember memiliki 3 kategori desa yaitu desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang. Jumlah tersebut jika dilihat pada data *time series* mengalami peningkatan dari yang semula pada tahun 2016 masih memiliki 1 desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal. Perubahan status desa secara historis ini disamping memiliki dampak positif yaitu kemajuan dari desa-desa itu sendiri yang cukup signifikan terlihat dari tahun 2016 hingga 2022, juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang terlihat adalah ketidakmerataan pembangunan desa yang ada di Kabupaten Jember, mengingat masih beragamnya kategori kemandirian desa dalam Indeks Desa Membangun.

Mengutip dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pembangunan desa diantaranya penelitian dengan judul Analisis Indeks Desa Membangun untuk mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu diteliti oleh Muhtarom, dkk (2018). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar desa di Kecamatan Gadingrejo masuk dalam klasifikasi desa berkembang sebesar 87%. Indikator ketahanan sosial merupakan indeks tertinggi dalam realisasi pembangunan desa-desa di Kecamatan Gadingrejo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dari data sekunder dan wawancara serta tidak menganalisis lebih dalam berkaitan dengan penyebab pola perkembangan yang terjadi di wilayah studi. Penelitian tersebut menjadi referensi variable perkembangan desa serta peneliti mengembangkan metode analisis menggunakan AHP guna identifikasi faktor penyebab pola perkembangan desa pada wilayah studi.

Penelitian dengan judul Analisis Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Sumenep, diteliti oleh Nurdody Zakki dkk (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan potensi yang terdapat di kedua desa adalah potensi alam dengan kondisi infrastruktur jalan yang sudah memadai namun belum dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai, perlu adanya pengembangan Kawasan aneka olahan berbahan dasar kelapa, potensi produksi perkebunan sawo, jagung, pisang dapat menjadi dasar bagi dilaksanakannya program pelatihan untuk memanfaatkan hasil perkebunan tersebut. Selanjutnya penelitian dengan judul evaluasi dan strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung, Bali, diteliti oleh Ni Nyoman Ayu Hari Nalayani (2016) membahas mengenai evaluasi dan rencana strategi pengembangan desa wisata di kabupaten Badung. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif mengenai potensi masing-masing desa, mengevaluasi desa wisata serta merumuskan strategi pengembangan masing-masing desa wisata. Perbedaan tujuan dan penggunaan metode analisis yang berbeda dari tiga penelitian terdahulu, mengimplikasikan bahwa penelitian dengan judul Determinasi Faktor Utama Dalam Ketidakmerataan Perkembangan Desa Di Kabupaten Jember merupakan penelitian yang memiliki keterbaruan dalam khasanah keilmuan.

Berdasarkan poin yang telah disampaikan, isu terkait pembangunan desa dan ketidakmerataan perkembangan desa di Kabupaten Jember serta faktor utama apa yang mempengaruhi dari ketidakmerataan tersebut menjadi topik urgen yang layak untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada para pakar untuk kemudian dapat dianalisis faktor utama ketidakmerataan perkembangan desa di Kabupaten Jember.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan sebuah penilaian yang didasarkan pada tiga indeks. Indeks pertama yaitu indeks ketahanan sosial dengan indikator Pendidikan, Kesehatan, modal sosial, dan permukiman. Indeks kedua yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi yang memiliki indikator diversifikasi produksi masyarakat, kemudahan aksesibilitas terhadap sarana perdagangan dan jasa, aksesibilitas terhadap logistik, keterjangkauan terhadap Lembaga keuangan dan Lembaga perkreditan serta keterjangkauan wilayah.

Selanjutnya indeks ketiga adalah kekuatan ekologi atau lingkungan dengan indikator kapasitas lingkungan, ketahanan terhadap bencana alam serta tanggap bencana.

Pengembangan indikator dalam Indeks Desa Membangun dirumuskan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan tiga aspek sebagai fokus yaitu aspek sosial, ekonomi dan ekologi (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, 2020). Pemerataan dan keadilan dalam kehidupan berbudaya dapat terwujud dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumberdaya alam.

Komponen penilaian IDM diuraikan sebagai berikut (Kementerian Desa, 2016):

- A. Indeks Ketahanan Sosial yang memiliki 4 dimensi diantaranya dimensi modal sosial, dimensi kesehatan, dimensi Pendidikan dan dimensi permukiman. Dimensi modal sosial terdiri dari indikator solidaritas sosial, keberadaan toleransi, keamanan penduduk dan kesejahteraan sosial. Dimensi kesehatan terdiri dari indikator pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan kepemilikan jaminan kesehatan. Dimensi Pendidikan terdiri dari indikator aksesibilitas ke pusat-pusat Pendidikan mulai dari Pendidikan formal maupun non formal. Dimensi permukiman memiliki indikator ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik dan teknologi informasi komunikasi). Penelitian yang dilakukan oleh Muhtarom dkk (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa jika dalam sebuah desa memiliki keaktifan pemberdayaan masyarakat yang tinggi, maka akan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas masyarakat yang nantinya juga akan berpengaruh pada peningkatan indeks ketahanan sosial desa.
- B. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi dengan indikator diversifikasi produksi masyarakat desa, keterjangkauan terhadap pusat sarana perdagangan dan jasa, keterjangkauan logistik, keterjangkauan terhadap Lembaga keuangan dan Lembaga perkreditan, Lembaga ekonomi serta keterjangkauan wilayah.
- C. Indeks ketahanan lingkungan (ekologi) terdiri dari dimensi ekologi dengan indikator kapasitas lingkungan, daerah potensi rawan bencana serta ketanggapan masyarakat terhadap bencana.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki lingkup pengambilan data yaitu pada seluruh desa di Kabupaten Jember. Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Perolehan data primer dilakukan dengan teknik wawancara, observasi lapangan untuk memberikan informasi terkait dengan gambaran umum desa-desa dengan status perkembangan paling rendah di Kabupaten Jember serta penyebaran kuisioner AHP kepada stakeholder (pemerintah, LSM, BUMDesa, serta perwakilan tokoh masyarakat desa). Penyebaran kuisioner AHP tentunya mengacu pada variabel. Selain data primer, perolehan data sekunder sebagai data penunjang dilakukan melalui studi literatur terhadap penelitian terdahulu serta data penunjang dari institusi terkait. Tabel 1 merupakan rincian kebutuhan data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**Tabel 1. Kebutuhan Data Penelitian**

Data yang dibutuhkan	Jenis data	Sumber	Teknik
Variabel, data social, ekonomi dan lingkungan pada desa-desa di Kabupaten Jember.	Sekunder	Kajian literatur, teori pendukung, standar dan aturan terkait	Kajian literatur
Faktor utama ketidakmerataan perkembangan desa, dan strategi pembangunan desa di Kabupaten Jember.	Primer	Stakeholders Terpilih (Bappeda Kab. Jember Dinas PUPR Kab. Jember Kelurahan dan kecamatan wilayah studi, masyarakat, dan stakeholder terkait)	In Depth Interview (kuisioner dan wawancara)

Sumber : Sintesa Pustaka, 2022

#### 3.2 Sampel Penelitian

Teknik *sampling* yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu Teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Tujuan ini tentunya disesuaikan dengan arah penelitian. Sampel yang dipilih dalam metode ini memiliki tujuan salah satunya sampel

merupakan pakar yang paling memahami tentang wilayah studi atau tentang kejadian dan fenomena tertentu. Alasan penggunaan teknik *Purposive Sampling* dalam penelitian ini karena kriteria yang sesuai dengan objek penelitian tidak terdapat pada semua sampel. Oleh karena itu, ditetapkan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah:

- A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember (1 Responden)
- B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember (1 Responden)
- C. Pemerintah desa dengan status terendah (berkembang) yaitu Pemerintah Desa Sucopangepok, Desa Mulyorejo, Desa Klungkung dan Desa Jambesari (masing-masing desa 1 responden)

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode AHP dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan. AHP merupakan sebuah pendekatan sistematis dalam penentuan keputusan yang tepat sebagai sebuah alternatif yang dianggap sesuai dan mampu menjawab tujuan penelitian (Saaty, 1993 dalam Pebakirang, 2017). Kudarsyah dan Ali Ramdhani (1998) dalam Munthafa (2017) menyatakan langkah-langkah dalam analisis AHP, yaitu:

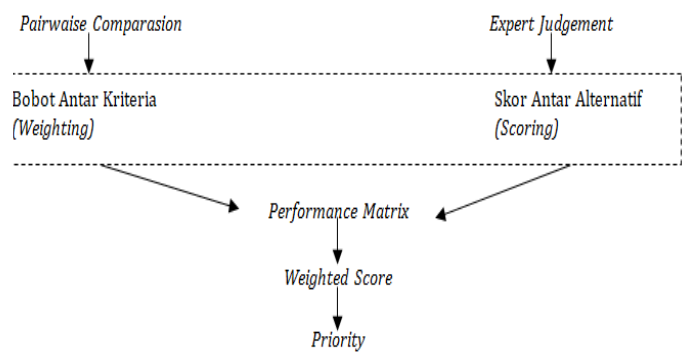
#### A. Identifikasi Masalah

Proses identifikasi masalah dilakukan secara detail, jelas, dan mudah dipahami. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, kemudian dirumuskan solusi yang sesuai dalam pemecahan masalah tersebut. Solusi dapat terdiri dari beberapa poin yang nantinya dapat berkembang.

#### B. Pembuatan Struktur Hirarki

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan penyusunan kriteria pemilihan serta pembuatan struktur hierarki. Dalam studi kasus yang diambil, penentuan kriteria untuk menentukan faktor utama dari ketidakmerataan perkembangan desa di Kabupaten Jember adalah dengan bertanya kepada *expert* menggunakan kuisioner berdasarkan kriteria berikut:

1. Kriteria ke-1 (K1) = Sosial
2. Kriteria ke-2 (K2) = Ekonomi
3. Kriteria ke-3 (K3) = Ekologi



Sumber: Munthafa (2017)

**Gambar 1. Alur Analytical Hierarchy Process dalam Menentukan Prioritas**

#### C. Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan

Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan untuk saling membandingkan besarnya kepentingan satu elemen dengan elemen lainnya. Matriks ini akan menggambarkan besarnya pengaruh satu elemen dengan elemen lainnya. Proses membandingkan elemen satu dan yang lainnya ini dimulai dari hierarki tertinggi, dilanjutkan dengan elemen yang akan dibandingkan. Apabila suatu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai satu. Namun jika dibandingkan dengan elemen lainnya maka akan mendapatkan nilai tertentu Tabel 2 merupakan penerapan matriks perbandingan berpasangan:

**Tabel 2. Matriks Perbandingan Berpasangan**

	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria n
Kriteria.1	K1.1	K1.2	K1.3	K1.n
Kriteria.1	K2.1	K2.2	K2.3	K2.n
Kriteria.1	K3.1	K3.2	K3.3	K3.n
Kriteria.m	Km.1	Km.2	Km.3	Km.n

Sumber: Munthafa (2017)

#### D. Identifikasi Perbandingan Berpasangan untuk Memperoleh Prioritas

Langkah selanjutnya adalah perhitungan bobot kriteria. Skala penilaian perbandingan antar elemen dapat dilihat pada tabel 3. Perhitungan bobot kriteria dilakukan dengan tahapan yaitu melakukan normalisasi dengan melakukan pembagian pada nilai perbandingan berpasangan. Nilai perbandingan berpasangan yang sudah dilakukan normalisasi selanjutnya dibagi dengan nilai pada masing-masing kriteria. Hasil normalisasi pada setiap kriteria

kemudian dijumlahkan yang menghasilkan bobot dari setiap kriteria pembandingan.

Tahap akhir yaitu lakukan pembagian pada jumlah bobot pada setiap kriteria dengan jumlah

kriteria (pembandingan) untuk selanjutnya dapat dilakukan evaluasi nilai bobot yang diperoleh dengan menjumlahkan, hasil penjumlahan harus sama atau mendekati satu ( $\sum W_i = 1$ ).

**Tabel 3. Skala Penilaian Perbandingan Pasangan**

<b>Kepentingan</b>	<b>Definisi</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Kriteria A maupun Kriteria B memiliki kepentingan yang sama dibanding dengan elemen yang lain ( <i>Equal importance</i> )	Kedua kriteria menyumbang sama besar pada sifat tersebut
3	Kriteria A memiliki kepentingan yang sedikit lebih penting dibandingkan Kriteria B ( <i>Moderate more importance</i> )	Pengalaman menyatakan sedikit memihak pada satu kriteria
5	Kriteria A memiliki kepentingan yang jelas lebih penting dibandingkan Kriteria B ( <i>Essential, Strong more importance</i> )	Pengalaman menunjukkan secara kuat memihak pada satu kriteria
7	Kriteria A memiliki kepentingan yang sangat jelas lebih penting dibandingkan Kriteria B ( <i>Demonstrated importance</i> )	Pengalaman menunjukkan secara kuat disukai dan dominannya terlihat dalam praktek
9	Kriteria A memiliki kepentingan yang mutlak lebih penting dibandingkan Kriteria B ( <i>Absolutely more importance</i> )	Pengalaman menunjukkan satu kriteria sangat jelas lebih penting
2,4,6,8	Pilihan nilai jika merasakan ragu diantara dua nilai yang berdekatan	Nilai yang diberikan apabila diperlukan kesepakatan

Sumber: Munthafa (2017)

#### E. Memeriksa Konsistensi Hirarki

Langkah terakhir yaitu mengkoreksi konsistensi hierarki yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Nilai perbandingan berpasangan dikalikan dengan bobot
- 2) Setiap hasil perkalian pada tahap satu dijumlahkan
- 3) Nilai eigenvektor diperoleh dengan membagi jumlah bobot dengan bobot kriteria ( $W_i$ )
- 4) Nilai eigenvalue yang sama dan mendekati satu dihitung dengan melakukan pembagian eigenvector dengan jumlah kriteria perbandingan.
- 5) Perhitungan nilai indeks konsistensi (CI) dengan rumus:

$$CI = \frac{t - n}{n - 1}$$

Keterangan:  
 CI : Indeks konsistensi  
 t : Nilai maksimum eigenvalue  
 n : Jumlah sampel

Sumber: Munthafa (2017)

- 6) Perhitungan rasio konsistensi (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI_n}$$

Keterangan:  
 CR : Rasio konsistensi  
 CI : Nilai random indeks  
 $RI_n$  : Nilai rata-rata CI

Sumber: Munthafa (2017)

Jika CR sama dengan 0, artinya hierarki memiliki model yang konsisten, Jika nilai CR kurang dari 0,1 berarti hierarki memiliki model yang cukup konsisten serta jika  $CR > 0,1$  berarti hierarki memiliki nilai yang tidak konsisten.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Desa Membangun memiliki lima kategori perkembangan desa yang dikalkulasi berdasarkan tiga aspek yaitu indeks ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan ekologi. Masing-masing aspek tersebut dijabarkan menjadi 6 dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi modal sosial, dimensi permukiman, dimensi ekologi, dimensi kesehatan dan dimensi Pendidikan. Keenam dimensi tersebut dijabarkan lebih rinci kedalam 54 indikator yang dijabarkan pada tabel 5. Namun penelitian ini berfokus kepada enam dimensi yang akan dinilai oleh pakar

dimensi yang paling utama yang harus menjadi prioritas pengembangan bagi desa-desa dengan status paling rendah.

**Tabel 4 Indikator Indeks Desa Membangun**

No.	Dimensi	Indikator
1	Kesehatan	1. Jarak dan waktu ke prasarana kesehatan
		2. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan maupun dokter dan tenaga kesehatan lain
		3. Keterjangkauan terhadap posyandu, polindes dan poskesdes
		4. tingkat aktivitas posyandu
		5. tingkat keikutsertaan BPJS
2	Pendidikan	1. Keterjangkauan ke sarana Pendidikan formal (SD, SMP dan SMA)
		2. Kegiatan pemberantasan buta aksara
		3. Aktifitas PAUD
		4. Aktivitas PKBM/ Paket ABC
		5. Keterjangkauan terhadap pusat Pendidikan non formal
		6. Keterjangkauan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa
3	Modal Sosial	1. Keberadaan kegiatan gotong royong masyarakat di desa
		2. Ketersediaan ruang terbuka publik gratis.
		3. Ketersediaan fasilitas olahraga
		4. Ketersediaan kelompok kegiatan olahraga
		5. Keberagaman suku dan etnis warga desa
		6. Keberagaman Bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari

No.	Dimensi	Indikator	No.	Dimensi	Indikator
		7. Keberagaman agama di desa			4. Jumlah ketersediaan usaha seperti perhotelan, restoran, kedai atau penginapan.
		8. Terdapat pemeliharaan poskamling oleh warga			5. Ketersediaan pelayanan kantor pos dan jasa logistik
		9. Partisipasi warga dalam kegiatan siskamling			6. Ketersediaan pelayanan dari lembaga perbankan umum
		10. Jumlah kriminalitas yang terjadi di desa			7. Ketersediaan Bank Perkreditan Rakyat
		11. Mediasi terhadap penyelesaian konflik yang terjadi			8. Ketersediaan Lembaga ekonomi rakyat
		12. Keterjangkauan ke sekolah luar biasa			9. Ketersediaan moda transportasi umum
		13. Keberadaan penyandang kesejahteraan sosial			10. Lebar jalan yang sesuai serta dapat dilalui oleh kendaraan bermotor minimal roda empat.
		14. Keberadaan kejadian warga yang mengakhiri hidupnya sendiri			11. Perkerasan jalan desa
4	Permukiman	1. Keterjangkauan masyarakat terhadap sumber air minum yang layak.			1. Keberadaan pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara)
		2. Keterjangkauan terhadap air bersih untuk kegiatan mandi dan mencuci		Ekologi	2. Keberadaan sungai yang tercemar oleh limbah
		3. Kepemilikan jamban oleh warga			3. Peristiwa bencana alam yang pernah terjadi
		4. Ketersediaan tempat pembuangan sampah			4. Upaya mitigasi bencana.
		5. Jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap listrik			
		6. Kepemilikan telepon seluar dengan sinyal yang memadai			
		7. Ketersediaan siaran televisi lokal, nasional dan asing			
		8. Ketersediaan akses internet			
5	Ekonomi	1. Keberagaman jenis kegiatan ekonomi penduduk			
		2. akses terhadap pusat perdagangan			
		3. ketersediaan sarana perdagangan di Kawasan permukiman			

Sumber: Kementerian Desa, 2016

Kategori indeks desa membangun terbagi menjadi lima dimana masing-masing kategori memiliki nilai ambang batas tertentu. Desa diklasifikasikan masuk dalam kategori mandiri apabila total nilai indeks lebih dari 0,8155, nilai 0,8155 hingga 0,7072 merupakan rentang nilai bagi desa yang termasuk kategori maju. Selanjutnya kategori desa berkembang jika memiliki nilai diantara 0,7072 hingga 0,5989. Desa tertinggal memiliki nilai 0,5989 hingga 0,4907 serta kategori terakhir yaitu desa sangat tertinggal dengan nilai kurang dari 0,4907.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2016-2022, Kabupaten Jember memiliki jumlah desa yang terus



berkembang. Dimulai dari 2016 masih terdapat satu desa yang masuk kategori sangat tertinggal dan 46 desa yang masuk dalam kategori tertinggal kemudian menurun pada tahun 2018 dengan jumlah desa tertinggal sebanyak 14 desa. Pada tahun 2020 hingga 2022 tidak ditemukan Kembali data desa yang termasuk kedalam kategori tertinggal maupun sangat tertinggal. Hal ini merujuk kea rah pembangunan desa yang positif. Disisi lain pada tahun 2022 keberagaman dari kategori perkembangan desa masih ada, hal ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan perkembangan desa. Pada tahun 2022 terdapat empat desa dengan kategori terendah se Kabupaten Jember yaitu Desa Sucopangepok, Desa Mulyorejo, Desa Klungkung dan Desa Jambesari.

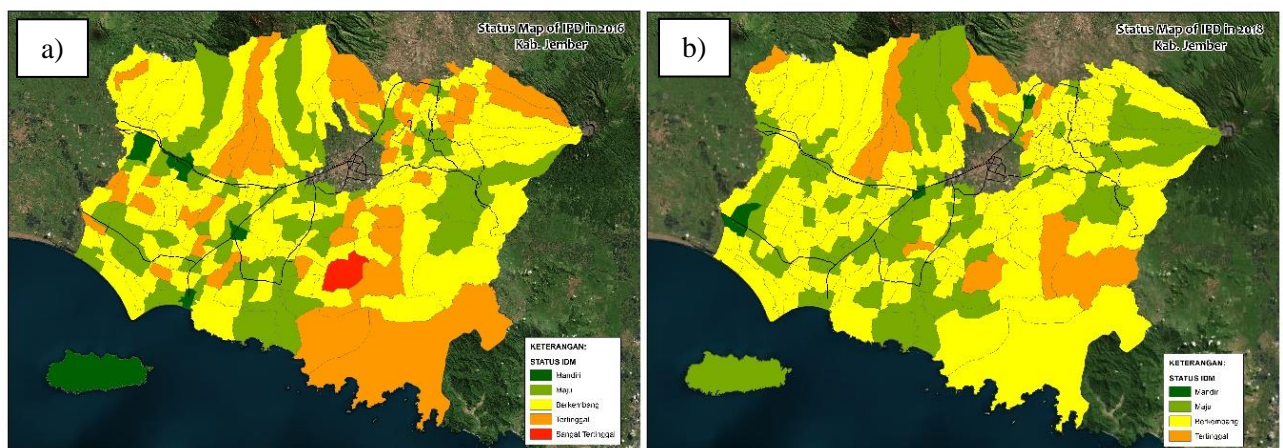
Gambar 2 merupakan peta sebaran status IDM Kabupaten Jember dari tahun 2016 hingga 2022. Pada peta tersebut dapat dilihat

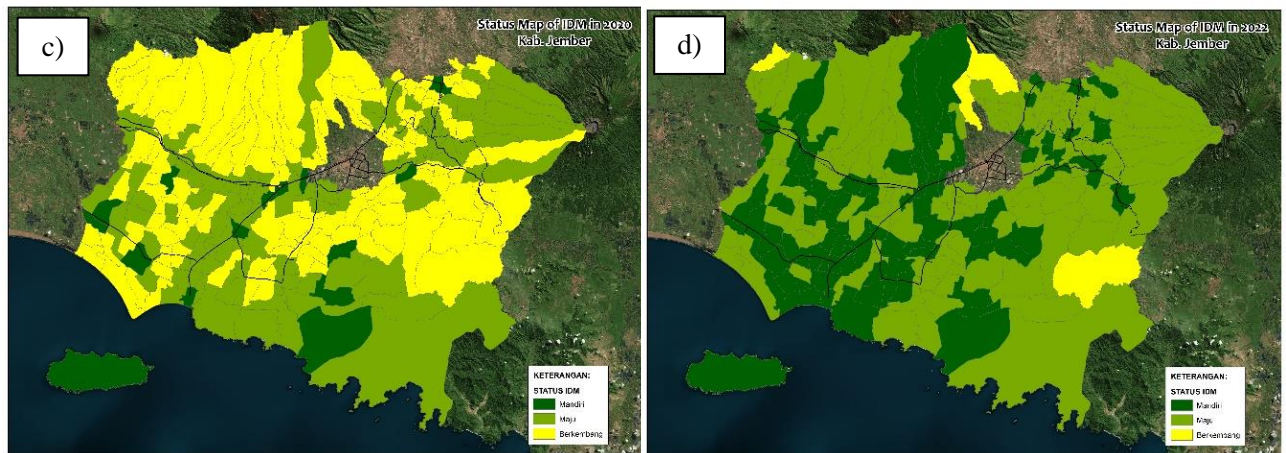
peningkatan perkembangan desa yang semula pada tahun 2016 terdapat 5 kategori, menjadi 3 kategori pada tahun 2022. Jika ditinjau dari lokasi desa yang berkembang, kecenderungan perkembangan yang timpang antara jember bagian utara dengan jember bagian selatan. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2016 dan 2018, desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal mayoritas berada pada desa-desa di bagian utara Kabupaten Jember. Seiring perkembangannya pula, pada tahun 2020 dan 2022 desa berkembang juga mayoritas berada pada bagian utara Kabupaten Jember. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa yang terletak pada bagian utara Kabupaten Jember memerlukan perhatian khusus terkait dengan pembangunannya.

**Tabel 6. Status IDM Kabupaten Jember Tahun 2016-2022**

No.	Status IDM	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2022
1.	Sangat Tertinggal	1 Desa	-	-	-
2.	Tertinggal	46 Desa	14 Desa	-	-
3.	Berkembang	115 Desa	141 Desa	117 Desa	4 Desa
4.	Maju	59 Desa	67 Desa	95 Desa	128 Desa
5.	Mandiri	5 Desa	4 Desa	14 Desa	94 Desa
Jumlah Desa		226 Desa	226 Desa	226 Desa	226 Desa

Sumber: Status IDM Provinsi, Kabupaten, Kecamatan





Sumber: Analisis dan Data Kementerian Desa, 2022

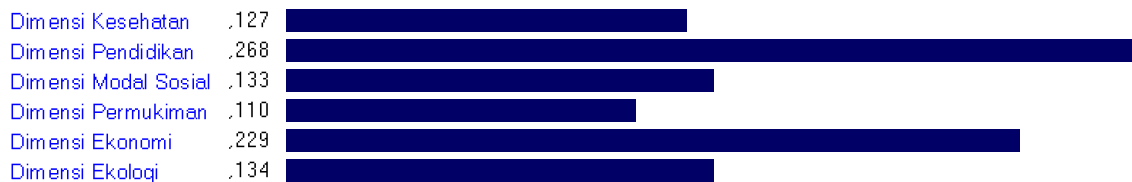
**Gambar 2** Peta Sebaran Status IDM Kabupaten Jember a) Status Indeks Desa Membangun tahun 2016; b) Status Indeks Desa Membangun tahun 2018; c) Status Indeks Desa Membangun tahun 2020; d) Status Indeks Desa Membangun tahun 2022

## Analisis AHP

### Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Goal: Faktor utama ketidakmerataan perkembangan desa

Overall Inconsistency = ,03



Sumber: Analisis, 2023

**Gambar 3.** Hasil Analisis AHP

Hasil penyebaran kuisioner AHP pada 6 pakar terpilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu satu pakar dari dinas PUPR dan cipta karya Kabupaten Jember, satu pakar dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta empat pakar dari masing-masing desa yang memiliki indeks desa membangun terendah se Kabupaten Jember. Pada Gambar 3 hasil dari analisis AHP menyatakan bahwa faktor utama dalam perkembangan desa terbagi menjadi 6 dimensi dengan hasil pengolahan data didapatkan nilai *inconsistency* sebesar 0,03. Nilai tersebut menunjukkan hasil dibawah standar *inconsistency* AHP yang ideal yaitu dibawah 0,1, sehingga hasil pengolahan tersebut valid dan dapat digunakan. Dimensi yang memiliki nilai tertinggi adalah dimensi pendidikan dengan nilai 0,268. Selain dimensi

pendidikan, dimensi pada nilai tertinggi kedua adalah dimensi ekonomi dengan nilai 0,229, faktor dimensi ekologi dengan nilai 0,134, faktor dimensi modal sosial dengan nilai 0,133, faktor dimensi kesehatan dengan nilai 0,127, dan yang terakhir yaitu dimensi permukiman dengan nilai 0,110. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Pendidikan merupakan faktor utama yang sudah semestinya menjadi *concern* pemerintah dalam pemerataan perkembangan desa. Dimensi pendidikan menjadi faktor utama dan paling penting karena dengan adanya peningkatan pendidikan akan memberikan dampak kenaikan tingkatan pada seluruh dimensi perkembangan desa di Kabupaten Jember.

Upaya pemerintah Kabupaten Jember pada faktor utama perkembangan desa dapat dilakukan dengan pemerataan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas ke sarana Pendidikan dan pusat pengembangan keterampilan/kursus, peningkatan pemberantasan buta aksara serta penyediaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

## 5. KESIMPULAN

Status IDM Kabupaten Jember pada tahun 2016 sampai tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Dibuktikan dari tidak terdapat lagi desa berstatus tertinggal dan jumlah desa berstatus berkembang semakin berkurang. Tahun 2022 tersisa 4 desa berkembang yang memiliki nilai terendah yaitu Desa Sucopangepok di Kecamatan Jelbuk, Desa Mulyorejo di Kecamatan Silo, Desa Klungkung di Kecamatan Sukorambi, dan Desa Jambesari di Kecamatan Sumberbaru. Faktor utama dalam perkembangan desa terbagi menjadi 6 dimensi. Dimensi yang memiliki nilai tertinggi adalah dimensi pendidikan dengan nilai 0,268. Selain faktor pendidikan, juga terdapat faktor tertinggi kedua yaitu dimensi ekonomi dengan nilai 0,229. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemerataan perkembangan desa dalam dimensi utama Pendidikan adalah dengan pemerataan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas ke sarana Pendidikan dan pusat pengembangan keterampilan/kursus, peningkatan pemberantasan buta aksara serta penyediaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas Jember atas dukungan dan pendanaan penelitian melalui skema hibah dosen pemula.

## 7. REFERENSI

- BPS. 2014. Data Potensi Desa. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. 2020. Tentang Indeks Desa Membangun.
- <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Profil Desa dan Kelurahan. <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>
- Kementerian Desa. 2016. Indeks Desa Membangun (IDM) Indonesia. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Kementerian Desa. 2018. Indeks Desa Membangun (IDM) Indonesia. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Kementerian Desa. 2020. Indeks Desa Membangun (IDM) Indonesia. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Kementerian Desa. 2022. Indeks Desa Membangun (IDM) Indonesia. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Hasraruddin. 2021. Memahami tentang SGDs Desa, Pengertian dan Tujuannya. <https://www.desamontongbeter.web.id/artikel/2021/4/24/memahami-tentang-sdgs-desa-pengertian-dan-tujuannya>.
- Iskandar, A. Halim..2020. SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Buku Obor: Jakarta.
- Muhtarom, Nurhadi Kusuma dan Eri Purwanti. 2018. Analisis Indeks Desa Membangun untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Jurnal Kelitbangan Vol..06\_No.02. E-ISSN 2622-190X. <http://journalbalitbangdalampung.org>.
- Munthafa, A. E., & Mubarak, H..2017. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. Jurnal Siliwangi Seri Sains dan Teknologi, 3(2).
- Nalyani, Ni Nyoman Ayu Hari. 2016. Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata

di Kabupaten Badung, Bali. JUMPA 2(2):  
189:198 ISSN 2406-9116.

Pebakirang, Sean A. M., 2017, Analisis Pemilihan Pemasok dengan Metode Analytical Hierarchy Process\_(AHP) di Proyek Indarung VI PT Semen Padang. Jurnal Teknik Industri Universitas Negeri Andalas.

Prabowo, T.A. 2013.. Perencanaan\_Desa Wisata BerbasisPembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Dinadra Creative.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Zakky, Nurdody, Isdiantoni, dan Isnani Yuli Andini. 2017. Jurnal Performance: Bisnis dan Akuntansi Volume VII No. 1 Maret 2017.